

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara “*megabiodiversity*” atau megabiodiversitas terbesar dalam urutan kedua setelah negara Brasil. Wulan Dwi Astuti seorang Peneliti Pusat Penelitian Bioteknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menjelaskan bahwa Indonesia disebut sebagai negara *megabiodiversity* karena besarnya tingkat keanekaragaman hayati yang ada. Hal tersebut terjadi karena Indonesia terletak di daerah tropis di mana posisi geografis Indonesia terletak tepat di garis khatulistiwa dan posisi geologisnya juga merupakan pertemuan lempeng tektonik yang membuatnya wilayah Indonesia juga menghasilkan banyak mineral. Fakta-fakta tersebut yang kemudian membuat Indonesia dapat menghasilkan variasi genetik dengan kuantitas besar baik dari satwa, tumbuhan bahkan mikroorganisme (Hanum, 2020).

International Union for Conservation of Nature (IUCN), badan internasional yang telah menjadi sumber informasi mengenai konservasi global spesies satwa, jamur, dan tumbuhan sejak 1964 memaparkan berdasarkan data tahun 2020 lebih dari 35.500 spesies terancam punah di mana total tersebut hanya 28% dari semua spesies yang telah dinilai. Data tersebut menunjukkan bahwa 40% jenis amfibi, 26% jenis mamalia, 14% jenis burung, 33% jenis hiu dan pari, 33% jenis terumbu karang, dan 28% krustasea terancam punah (IUCN, 2020).

Indonesia yang dikenal dengan berbagai macam satwanya juga dikenal sebagai negara dengan daftar panjang mengenai satwa yang terancam punah. Indonesia masuk ke dalam urutan kedua dalam daftar negara dengan ancaman punahnya spesies satwa dan tanaman terbesar di dunia setelah negara Meksiko. Indonesia memiliki 583 spesies yang terancam akan kepunahan dengan jumlah jenis mamalia yang terancam punah tertinggi berjumlah 191 jenis dan jumlah jenis burung yang terancam punah tertinggi kedua berjumlah 160 jenis. Disamping itu, walau daratan Indonesia hanya 1 persen dari total daratan yang ada di dunia, namun Indonesia mempunyai 12 persen spesies mamalia dan 17 persen spesies burung yang ada di dunia (Yanuar, 2019).

Isu mengenai kesejahteraan satwa atau disebut *animal welfare* menjadi isu yang kerap diperbincangkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, *Animal welfare* merupakan segala hal yang berhubungan dengan keadaan fisik maupun mental satwa berdasarkan ukuran perilaku alami satwa yang perlu ditegakkan untuk melindungi satwa dari perlakuan yang tidak baik oleh manusia. Terdapat konsep “*The Five Freedoms*” yang dicetuskan oleh Kerajaan Inggris pada tahun 1992 untuk menilai kesejahteraan satwa.

Lima poin kebebasan tersebut diantaranya yaitu bebas dari rasa lapar dan haus, bebas dari rasa tidak nyaman, bebas dari rasa sakit, bebas untuk mengekspresikan perilaku normal serta bebas dari rasa stress maupun tertekan. Lima poin tersebut selalu saling berkaitan, apabila salah satu poin tidak terpenuhi akan memberi pengaruh kepada faktor yang lain yang menjadi cikal bakal adanya eksploitasi satwa (Widyayandani dalam Yasmin, Setianti & Agung, h. 159).

Sejumlah regulasi di Indonesia telah dibuat dengan harapan untuk melindungi satwa, salah satunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pasal 21 Ayat 2 bagian A Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Namun dalam pelaksanaannya, larangan tersebut tidak membuat para pelaku berhenti untuk melakukan eksploitasi terhadap satwa khususnya yang dilindungi.

Pada tanggal 9 Januari 2021, Petugas Polres Banyumas menangkap pelaku yang memperjualbelikan landak jawa dan trenggiling yang dilindungi (Aminah, 2021). Kemudian dari pihak pemerintah juga melakukan pelanggaran terhadap keberadaan satwa langka melalui proyek pembangunan di Pulau Komodo yang secara jelas juga bertentangan dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 4 tahun 1993 tentang Satwa dan Bunga Nasional yang telah menetapkan bahwa Komodo merupakan satwa nasional yang memiliki hak untuk dilindungi dan dilestarikan keberadaannya. Pembangunan di Pulau Komodo ini juga melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 khususnya di pasal 19 yang mengatur bahwa setiap orang dilarang untuk melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam (Yolandha, 2020).

Eksplorasi satwa di Indonesia juga kerap dilakukan melalui atraksi-atraksi seperti berfoto bersama satwa yang juga melanggar kesejahteraan satwa serta membahayakan masyarakat. Tahun 2017 lalu seorang anak Taman Kanak-Kanak diterkam harimau saat sedang berfoto bersama di Jawa Timur Park 2 di Kota Batu. Atraksi tersebut

menampilkan seekor bayi harimau bengala yang memungkinkan untuk diajak berfoto. Ketika salah satu anak akan berfoto dengan harimau tersebut, anak-anak lain membuat gaduh sehingga membuat harimau menjadi gelisah dan stress dan membuat harimau tersebut mencengkram anak yang sedang berfoto tersebut (Widianto, 2017).

Selain beberapa pelanggaran tersebut, salah satu pelanggaran terhadap kesejahteraan satwa yang marak masih terjadi adalah masih berjalannya bisnis sirkus di Indonesia. Pada Februari 2013, Kementerian Kehutanan menyatakan bahwa segala macam sirkus atau pertunjukan satwa merupakan hal yang kejam dan illegal. Hal tersebut selaras dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 mengenai konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistem yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang memelihara dan memperniagakan atau mengeksploitasi satwa langka.

Namun, pada faktanya, beberapa sirkus masih beroperasi dengan mengantongi izin dari pemerintah. Perseroan Terbatas atau disebut (PT). Wersut Seguni Indonesia (WSI) pada tahun 2019 mengantongi izin dari pemerintah untuk menggelar atraksi sirkus lumba-lumba keliling yang kemudian menuai kontroversi. *Animal Friends Jogja* (AFJ) menganggap bahwa pemberian izin tersebut merupakan bentuk ketidakpedulian Pemerintah Kabupaten Sleman atas eksploitasi satwa padahal penggelaran sirkus keliling tersebut sempat ditentang di hampir setiap kota yang mereka datangi, namun Pemerintah Kabupaten Sleman malah dengan terbuka memberi izin.

Di sisi lain, Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam walau telah melarang adanya sirkus lumba-lumba keliling, tetap memiliki pedoman peragaan lumba-lumba yang justru menimbulkan pertanyaan mengenai kebijakan pelarangan tersebut

karena seringkali sirkus satwa khususnya lumba-lumba menggunakan kedok edukasi untuk tetap mendapat profit dari pertunjukannya (Suryana, 2019).

GAMBAR 1

Animal Friends Jogja Menggelar Aksi Unjuk Rasa Menolak Sirkus Lumba-Lumba



Sumber: Metro Times News, 2019

Berangkat dari beberapa kasus eksploitasi satwa tersebut, penggambaran media mengenai isu ini juga kerap tidak bijak dan dapat dikatakan mengeksploitasi satwa liar dan dilindungi. Salah satunya acara *Rumpi* di Trans TV yang sempat mengundang bintang tamu seorang pengguna sosial media TikTok yang ramai karena memelihara monyet liar. Monyet tersebut kemudian ikut hadir di acara itu dan didandani layaknya bintang tamu manusia. Hal ini termasuk eksploitasi satwa liar karena tidak seharusnya satwa liar berada di lingkungan tersebut, tidak seharusnya dipelihara dan tidak

seharusnya diperlakukan tidak normal seperti didandani dalam acara tersebut (Fadhilah, 2021).

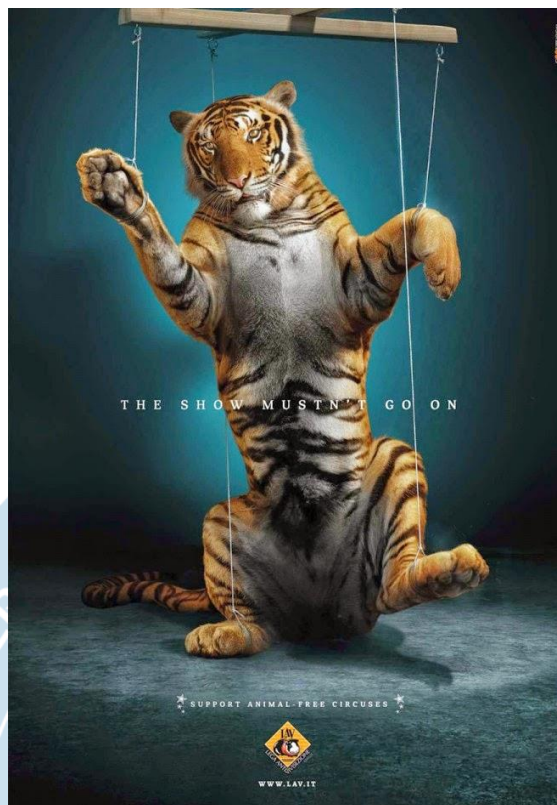
Isu eksploitasi satwa tidak hanya menjadi isu yang ada di Indonesia, namun merupakan isu di berbagai belahan dunia. Salah satu organisasi asal Italia, Lega Anti Vivisezione untuk selanjutnya disebut LAV membuat sebuah kampanye dalam bentuk poster yang berisi pesan untuk mendukung sirkus tanpa satwa. LAV merupakan organisasi asal Italia yang menentang semua bentuk eksploitasi satwa dan memperjuangkan hak-hak satwa, organisasi ini kerap melakukan kegiatan untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap kesejahteraan satwa salah satunya melalui kampanye. LAV sendiri juga mengadopsi konsep “*the five freedoms*” dalam menjalankan kegiatannya. Walaupun tidak secara gamblang, setiap kegiatan dan kampanye LAV dilandaskan oleh nilai-nilai yang ada pada “*the five freedoms*” di mana satwa harus sejahtera dan bebas dari hal-hal yang seharusnya tidak mereka alami (LAV, 2022).

Pada tahun 2014, LAV bersama dengan *Born Free*, badan amal yang memperjuangkan kesejahteraan satwa liar juga sempat melakukan penyelamatan terhadap singa sirkus yang diperlakukan kejam dalam naungan lembaga sirkus yang memilikinya, sampai kasus tersebut dibawa ke pengadilan dan dimenangkan oleh LAV di tahun 2018 hingga singa tersebut akhirnya tidak diizinkan kembali sebagai satwa sirkus (Born Free, 2014).

Berikut adalah salah satu poster yang dirilis oleh Lega Anti Vivisezione:

GAMBAR 2

Poster “The Show Musn’t Go On”



Sumber: Ads of The World, 2010

Poster tersebut mengusung tema “The Show Musn’t Go On” yang berarti “Pertunjukan Tidak Boleh Dilanjutkan” dan menggambarkan seekor harimau yang kaki dan tangannya diikat seakan sedang dikendalikan seperti boneka pertunjukan. Walaupun poster tersebut dirilis oleh organisasi yang berasal dari luar negeri, isu yang diangkat oleh poster tersebut sangat relevan dengan situasi yang sedang terjadi di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Maraknya kasus eksploitasi terhadap satwa membuat peneliti tertarik untuk mengulik makna yang ingin disampaikan poster kampanye tersebut secara mendalam.

Peneliti merujuk pada beberapa penelitian sebelumnya sebagai sumber referensi dan memunculkan kebaruan. Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Martha Christine dan Ilona Vicenovie Oisina Situmeang berjudul “Representasi Egoisme Poster

Anti Perburuan Ilegal Organisasi World Wildlife Foundation”. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa poster tersebut terdiri dari tanda yang merujuk pada egoisme dan kekejaman manusia terhadap satwa. Poster dalam penelitian ini lebih menyoroti manusia sebagai dalang utama atau pelaku yang kejam, namun tidak begitu menyoroti satwa sebagai korban dari eksploitasi tersebut. Peneliti terdahulu sama-sama menyoroti isu eksploitasi satwa yang dikampanyekan melalui poster dan sama-sama menggunakan analisis semiotika milik Charles Sanders Peirce (Christine & Situmeang, 2017).

Penelitian lainnya dilakukan oleh Yasmin, Yanti Setianti dan Ari Agung Prastowo dengan judul “Representasi Eksploitasi Satwa dalam Film Rise of The Planet of The Apes”. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa film Rise of The Planet of The Apes merepresentasikan eksploitasi terhadap kera melalui kode sosial seperti perilaku, ekspresi dan gerakan, dialog bahkan ideologi. Penelitian ini menggunakan film sebagai objeknya, sedangkan peneliti menggunakan poster. Kemudian, penelitian ini menggunakan analisis semiotika milik John Fiske, sedangkan peneliti menggunakan analisis semiotika milik Charles Sanders Peirce. Kesamaan terletak pada isu yang diangkat yaitu sama-sama menyoroti eksploitasi satwa (Yasmin, Setianti & Prastowo, 2017).

Dua penelitian sebelumnya yang menjadi referensi peneliti berfokus pada isu eksploitasi satwa yang marak terjadi. Namun kedua penelitian tersebut juga memiliki perbedaan yaitu pada objek penelitiannya. Penelitian ini menjadi berbeda karena analisis mengenai eksploitasi satwa dalam poster kampanye belum ada yang pernah meneliti sehingga peneliti merasa bahwa penelitian ini cukup membawa kebaruan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut: bagaimana representasi eksploitasi satwa dalam poster “The Show Musn’t Go On” dengan menggunakan analisis semiotika Charles Sanders Peirce?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka peneliti merumuskan tujuan penelitian sebagai berikut: mengetahui representasi eksploitasi satwa dalam poster “The Show Musn’t Go On” dengan menggunakan analisis semiotika milik Charles Sanders Peirce.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu komunikasi serta membantu pihak lain yang hendak melakukan penelitian serupa.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai tanda-tanda mengenai eksploitasi satwa yang terdapat dalam poster kampanye serta mengembangkan pengetahuan mengenai simbol yang ada di dalam poster.

E. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, kerangka teori yang peneliti gunakan di antaranya sebagai berikut:

1. *Animal Welfare* (Kesejahteraan Satwa)

Webster (2005, h. 2) menjelaskan bahwa untuk sebagian besar orang, kesejahteraan satwa atau kerap disebut *animal welfare* merupakan satu ungkapan yang erat kaitannya dengan moralitas di mana pada dasarnya semua manusia bertanggungjawab atas masing-masing satwa yang dipelihara atau bahwa bebas berkeliaran di alam. Namun, berbeda halnya dengan kesejahteraan satwa menurut para ilmuwan, Fraser & Broom dalam Webster (2005, h. 2) menjelaskan bahwa kesejahteraan satwa merupakan keadaan ketika satwa mencoba untuk mengatasi lingkungannya dan mengumpulkan bukti yang berkaitan dengan keadaan fisik dan mental satwa saat berusaha untuk memenuhi kebutuhan fisiologis dan perilakunya.

Untuk memahami kesejahteraan satwa dan mempraktikkannya, tidak cukup hanya dengan mengungkapkan keinginan untuk melihat bahwa satwa sehat dan merasa baik, tetapi juga mengubah itu menjadi aturan yang harus diterapkan dan dilakukan secara langsung. Pendekatan Webster terhadap implementasi praktis dari kesejahteraan yang baik dikemas dalam 'Lima Kebebasan' atau '*The Five Freedoms*' (Webster, 2005, h. 12).

The Five Freedoms ditetapkan oleh pemerintah Inggris Raya yang mendirikan komisi untuk melakukan investigasi perlakuan terhadap satwa di pertanian setempat. Berdasarkan investigasi tersebut, komisi tersebut mengambil kesimpulan bahwa diperlukan untuk menetapkan satu garis kebijaksanaan mengenai bagaimana satwa harus diperlakukan.

Akhirnya terdapat standar minimum untuk peternakan ayam, babi, dan sapi di mana satwa-satwa tersebut harus memiliki kebebasan untuk 'berdiri,

berbaring, berbalik, merawat diri dan meregangkan anggota tubuhnya'. Seiring berjalannya waktu, standar yang berlaku hanya untuk satwa di pertanian, semakin berkembang menjadi lebih luas dan lengkap yang akhirnya dikenal sebagai *The Five Freedoms* yang diakui di seluruh dunia. Berarti, siapapun harus bertanggungjawab untuk menerapkan lima kebebasan berikut terhadap satwa (Webster, 2005, h. 12):

- a. *Freedom from thirst, hunger and malnutrition*: bebas dari rasa haus, lapar dan kekurangan gizi

Akses mudah untuk air bersih dan makanan cukup kapanpun yang mereka mau untuk menjaga kesehatan dan kekuatan dari satwa.

- b. *Freedom from discomfort*: bebas dari ketidaknyamanan

Menyediakan lingkungan yang nyaman dan sesuai dengan satwa tersebut seperti tempat berteduh dan tempat beristirahat yang nyaman. Selain itu faktor pendukung lainnya seperti temperatur, kelembaban, sirkulasi udara, bahkan pencahayaan harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan dari satwa tersebut.

- c. *Freedom from pain, injury and disease*: bebas dari rasa sakit, cedera dan penyakit

Melakukan pencegahan dengan memperlakukan satwa sebagaimana mestinya, atau ketika sudah terjadi bisa dilakukan pemeriksaan dan diagnosis serta pengobatan atau tindakan yang cepat.

- d. *Freedom from fear and distress*: bebas dari rasa takut dan tertekan

Memastikan kondisi yang menghindari penderitaan mental seperti kebosanan, rasa stress, ketakutan dan rasa susah terutama yang dilakukan dengan sengaja dan paksa.

- e. *Freedom to express normal behaviour*: bebas untuk mengekspresikan perilaku

Menyediakan ruang yang cukup, fasilitas yang layak dan memberikan satwa kesempatan untuk berinteraksi dengan satwa dari jenis yang sama. Termasuk untuk tidak memaksa atau dengan sengaja membuat satwa melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan.

2. Representasi

Representasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *representation* yang berarti perwakilan atau penggambaran atau dapat dengan sederhana diartikan sebagai penggambaran suatu hal, peristiwa atau kejadian yang ada di kehidupan sehari-hari dan ditunjukkan melalui suatu media. Disamping itu, representasi juga dapat dipahami sebagai bagian penting dari sebuah pemaknaan yang kemudian dipertukarkan antar budaya, bahasa, tanda dan citra yang mewakili (Hall dalam Kharisma & Mayangsari, 2018, h. 1214).

Menurut Danesi (2010, h. 65), representasi dapat didefinisikan sebagai penggunaan tanda (seperti gambar, suara, dan lainnya) dengan tujuan untuk menghubungkan, menggambarkan, memotret, atau memproduksi sesuatu yang dilihat, diindera, dibayangkan, atau dirasakan dalam bentuk fisik tertentu. Danesi juga menyatakan bahwa representasi tidak merujuk kepada dirinya sendiri, melainkan kepada hal yang lain. Sifatnya ini membuat representasi sering

dipertanyakan kemampuannya untuk bisa menciptakan ‘sesuatu’ di luar dirinya karena sering kali representasi malah beralih menjadi ‘sesuatu’ itu sendiri.

Representasi berlaku pada hubungan tanda dan makna dan bersifat dinamis yakni dapat berubah-ubah yang otomatis akan selalu ada pemaknaan baru. Pemaknaan itu sendiri dapat berbeda satu orang dengan yang lainnya karena perbedaan latar belakang budaya, pengalaman dan referensi yang dimiliki masyarakat (Lathifah, 2015, h. 10).

Giles dan Middleton (1999, h. 56-57) menjelaskan representasi ke dalam tiga poin:

- a. *To stand it for* yaitu melambangkan sesuatu
- b. *To speak or act on behalf of* yaitu berbicara atau berperilaku atas sesuatu, dan
- c. *To represent* yaitu mewakili suatu peristiwa atau isu.

Sedangkan menurut Stuart hall terdapat dua proses dalam representasi:

- a. Representasi mental yaitu peta konsep yang dibentuk di dalam kepala manusia sehingga bersifat abstrak, dan manusia memaknai sebuah tanda dengan menghubungkan konsep atau pengalaman yang ia miliki di kepalanya,
- b. Bahasa sebagai konstruksi makna, peta konsep yang berbentuk abstrak dikaitkan dengan bahasa dan simbol untuk merepresentasikan konsep tentang sesuatu karena makna tidak akan dapat dikomunikasikan tanpa adanya bahasa.

3. Kampanye Sosial

Menurut Rogers & Storey (dalam Setiawan & Fithrah, 2018, h. 104) kampanye merupakan serangkaian aktivitas komunikasi yang diorganisir dengan tujuan menciptakan dampak atau efek tertentu pada khalayak secara berkelanjutan

dengan periode waktu tertentu. Venus dalam Sari (2019, h. 88) menjelaskan bahwa kampanye sosial merupakan aktivitas komunikasi yang dilakukan dengan cara yang terlembaga. Oleh karena itu, penyelenggara kampanye sosial pada umumnya merupakan sebuah lembaga atau organisasi.

Lebih lanjut, Charles Larson dalam Sari (2019, h. 88) menjelaskan bahwa kampanye sosial dapat dibagi menjadi 3 kategori:

- a. *Product-oriented campaigns* atau kampanye yang berorientasi kepada suatu produk di mana kampanye dilakukan untuk kegiatan komersil untuk memasarkan suatu produk.
- b. *Candidate-oriented campaigns* atau kampanye yang berorientasi kepada calon atau kandidat untuk kepentingan politik.
- c. *Ideological or cause-oriented campaigns* atau kampanye yang berorientasi kepada nilai dan tujuan yang bersifat khusus.

Poster merupakan salah satu dari produk kampanye sosial, yang lebih lanjut Yaumi (2008, h. 123) menjelaskan bahwa poster adalah karya seni grafis yang di dalamnya terdapat komposisi gambar dan huruf untuk menyampaikan pesan tertentu secara efektif. Selain itu, poster memiliki beberapa tujuan lain yaitu (1) untuk mengumumkan, (2) untuk promosi sebuah layanan ataupun jasa, (3) untuk menjual suatu produk, (4) untuk membentuk sebuah sikap atau sebuah pandangan akan suatu hal.

Sama halnya dengan kampanye sosial, poster memiliki jenisnya masing-masing. Menurut Yaumi (2018, h. 205), poster terbagi menjadi empat jenis:

a. Poster Niaga

Jenis poster ini merujuk pada poster sebagai media komunikasi diciptakan untuk kepentingan perniagaan, untuk memasarkan suatu barang atau jasa.

b. Poster Kegiatan

Jenis poster ini merujuk pada suatu acara atau kegiatan yang di dalamnya berisi informasi mengenai suatu acara dengan tujuan untuk menarik orang hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

c. Poster Pendidikan

Jenis poster satu ini merupakan jenis poster yang bertujuan Pendidikan yang isinya berisi beberapa hal yang ada kaitannya dengan pendidikan.

d. Poster Layanan Masyarakat

Jenis poster ini merupakan poster yang digunakan dalam penelitian, yang merupakan poster untuk pelayanan kesehatan yang biasanya berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, poster ini juga biasanya berhubungan dengan hal-hal yang menyangkut aturan-aturan yang sudah dicanangkan pemerintah agar dapat ditaati. Lebih dari itu, jenis poster ini juga bertujuan untuk menyampaikan nilai dan tujuan tertentu yang bersifat khusus.

4. Semiotika

Secara etimologi, kata “semiotika” berasal dari bahasa Yunani, *semeion* yang memiliki arti “tanda” (Sudjiman & van Zoest dalam Sobur, 2003, h. 16) atau juga berasal dari kata *seme* yang memiliki arti “penafsir tanda” (Cobley & Jansz dalam Sobur, 2003, h. 16). Sebuah tanda dapat disebut sebagai tanda ketika hal

tersebut dapat diamati atau dibuat teramati, oleh sebab itu tanda sebuah tanda tidak hanya terbatas pada benda (Mudjiyanto & Nur, 2013, h. 73).

Lebih lanjut, van Zoest dalam Sartini (2007, h. 3), menjelaskan 5 kriteria tanda;

- a. Tanda harus bisa diamati agar dapat berfungsi
- b. Tanda harus dan mutlak untuk dapat dilihat atau ditangkap
- c. Tanda harus merujuk pada sesuatu yang lain
- d. Tanda bersifat representatif dan memiliki hubungan langsung dengan sifat interpretatif
- e. Sesuatu dianggap sebuah tanda atas dasar satu dan lain.

Teori semiotik adalah hasil perkembangan dari strukturalisme, di mana pendekatan strukturalisme mulai dikenal pada tahun 1950-an oleh berbagai tokoh, Ferdinand Saussure menjadi tokoh utama pencetus strukturalisme. Meskipun pengembangan oleh Saussure dianggap berpengaruh terhadap perkembangan strukturalisme Perancis, filsuf asal Amerika, Charles Sanders Peirce yang kemudian membuat konseptualisasi mengenai tanda secara lebih lengkap hingga muncul istilah semiotika (Trifonas dalam Barliana, 2008, h. 5).

Istilah semiotika muncul pada akhir abad ke-19 oleh filsuf aliran pragmatik dari Amerika, Charles Sanders Peirce (Sobur, 2003, h. 13). Littlejohn dalam Sobur (2003, h. 15) lebih lanjut mengungkapkan bahwa tanda (*sign*) adalah dasar dari semua komunikasi. Semiotika yang dalam istilah Barthes disebut dengan semiologi pada dasarnya hendak mempelajari bagaimana manusia (*human*) atau kemanusiaan (*humanity*) memakani hal-hal (*things*). Suatu tanda

menandakan sesuatu selain dirinya sendiri, dan makna (*meaning*) merupakan hubungan antara suatu objek atau ide dan tanda (Littlejohn dalam Sobur, 2003, h. 15-16).

a. Semiotika Charles Sanders Peirce

Salah satu pendekatan tanda dipaparkan oleh Charles Sanders Peirce, seorang filsuf asal Amerika. Peirce terkenal karena sistem filosofisnya yang kemudian dikenal dengan sebutan pragmatisme, yang menyatakan bahwa signifikansi teori atau model apapun terletak pada efek praktis dari penerapannya. Model tandanya menjadi sangat berpengaruh dan membentuk sebagian besar karya kontemporer dalam semiotik (Danesi, 2004, h. 26).

Peirce dalam Sobur (2003, h. 34), menjelaskan bahwa suatu tanda berkaitan dengan objek yang menyerupainya, keberadaannya juga memiliki hubungan sebab akibat dengan suatu tanda atau karena ikatan konvensional dengan suatu tanda tersebut. Peirce dalam pendekatannya menggunakan tiga istilah; ikon, indeks dan simbol. Ikon adalah tanda yang menunjukkan referensi melalui bentuk replikasi, simulasi, imitasi atau kempiripan. Indeks adalah tanda yang mewakili referensi dengan menghubungkannya dengan referensi lain baik secara eksplisit atau implisit. Simbol adalah tanda yang hubungan dengan objeknya merupakan hasil dari kesepakatan, konvensi, fakta atau sejarah (Danesi, 2004, h. 27).

TABEL 1
Hubungan Tanda dengan Rujukan

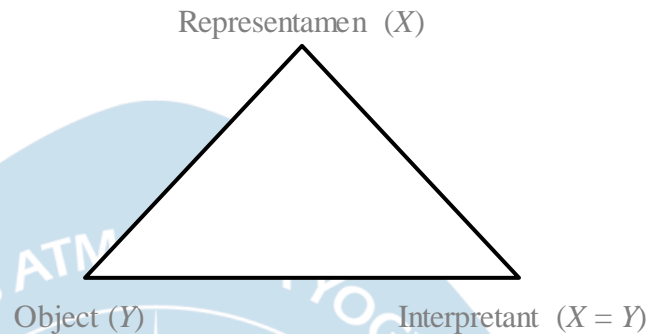
Jenis Tanda	Hubungan Antara Tanda dan Rujukannya	Contoh
Ikon	Tanda yang menunjukkan adanya hubungan yang bersifat serupa antara pendanda dengan petandanya.	Gambar, foto, kata-kata <i>onomotopoetic</i> (kata-kata untuk menggambarkan efek suara dari sesuatu) dan sebagainya.
Indeks	Tanda yang menunjukkan adanya hubungan sebab akibat antara penanda dan petandanya.	Kata penunjuk (ini, itu, di sana, di sini), petunjuk arah, dialek berbahasa, dan sebagainya.
Simbol	Tanda yang menunjukkan adanya hubungan yang bersifat konvensional antara penanda dan petandanya.	Angka, logo, simbol yang disepakati masyarakat (lambang daur ulang, barcode) dan sebagainya.

Sumber: Danesi, 2004

Danesi (2004, h. 26) lebih lanjut menjelaskan bahwa Peirce menyebut tanda sebagai representamen. Kemudian konsep, ide dan sebagainya merujuk pada objek. Sedangkan untuk makna yang diperoleh dari sebuah tanda disebut sebagai interpretan. Ketiga dimensi tersebut selalu hadir dalam sebuah pemaknaan, sehingga Peirce memadamg tanda sebagai triadik bukan biner. Model triadik oleh Peirce ini dapat dilihat dalam gambar berikut:

BAGAN 1

Model Triadik Semiotika Charles Sanders Peirce



Sumber: Danesi, 2004

Menurut Peirce dalam Sobur (2003, h. 41), tanda didefinisikan “*is something which stands to somebody for something in some respect or capacity.*” Agar tanda dapat berfungsi, Peirce menggunakan *ground*. Oleh karena itu, tanda (*sign* atau *representamen*) selalu muncul dalam hubungan triadik, yakni *representament*, *object*, dan *interpretant*.

1) Representamen

Representamen merupakan sesuatu yang merepresentasikan sesuatu yang lain, di mana dalam eksplanasinya dibagi menjadi tiga jenis yaitu (Sobur, 2003, h. 41):

- a) *Qualisign*; merupakan tipe representamen yang dilihat melalui kualitasnya yang muncul pada tanda, misalnya kata-kata kasar, keras, lembut dan lainnya.
- b) *Sinsign*; tanda yang dilihat berdasarkan eksistensi atau tampilannya dalam kenyataan, misalnya suara ayam berkokok yang

menandakan hari telah pagi, suara tawa yang menandakan seseorang sedang bahagia, dan lainnya.

- c) *Legisign*; merupakan tanda yang sudah berlaku secara umum atau sudah disepakati bersama dalam masyarakat, misalnya rambu lalu lintas, marka jalan, dan lainnya.

2) Objek

Objek adalah tanda yang dilihat berdasarkan objek yang ditandai. Berdasarkan objeknya dibagi menjadi tiga:

- a) *Ikon*; tanda yang menunjukkan adanya hubungan yang bersifat serupa antara pendanda dengan petandanya, misalnya peta dunia, foto, gambar dan lainnya.
- b) *Indeks*; tanda yang menunjukkan adanya hubungan sebab akibat antara penanda dan petandanya, misalnya asap berarti ada api.
- c) *Simbol*; tanda yang menunjukkan adanya hubungan yang bersifat konvensional antara penanda dan petandanya, misalnya lambang daur ulang di tempat sampah berarti tempat sampah tersebut diperuntukkan untuk sampah-sampah yang dapat didaur ulang (Sobur, 2003, h. 41-42).

3) Interpretan

Interpretan merupakan makna yang diperoleh dari sebuah tanda. Berdasarkan *interpretant*, tanda dibagi menjadi tiga:

- a) *Rheme*; tanda yang memungkinkan seseorang menafsirkan tanda tersebut berdasarkan pilihan, misalnya orang yang hidungnya

berair dapat saja menandakan bahwa orang itu sedang terkena pilek, atau baru saja menangis, atau baru memakan makanan pedas.

- b) *Dicent sign* atau *dicisign*; tanda yang muncul sesuai dengan kenyataan yang ada, misalnya di depan masjid biasa terdapat tanda untuk kendaraan mengurangi kecepatan karena banyak jamaah masjid atau anak-anak menyeberang.
- c) *Argument*; tanda yang memberikan alasan mengenai suatu hal, misalnya larangan merokok di pom bensin karena banyak bahan yang mudah terbakar di tempat tersebut.

F. Metodologi Penelitian

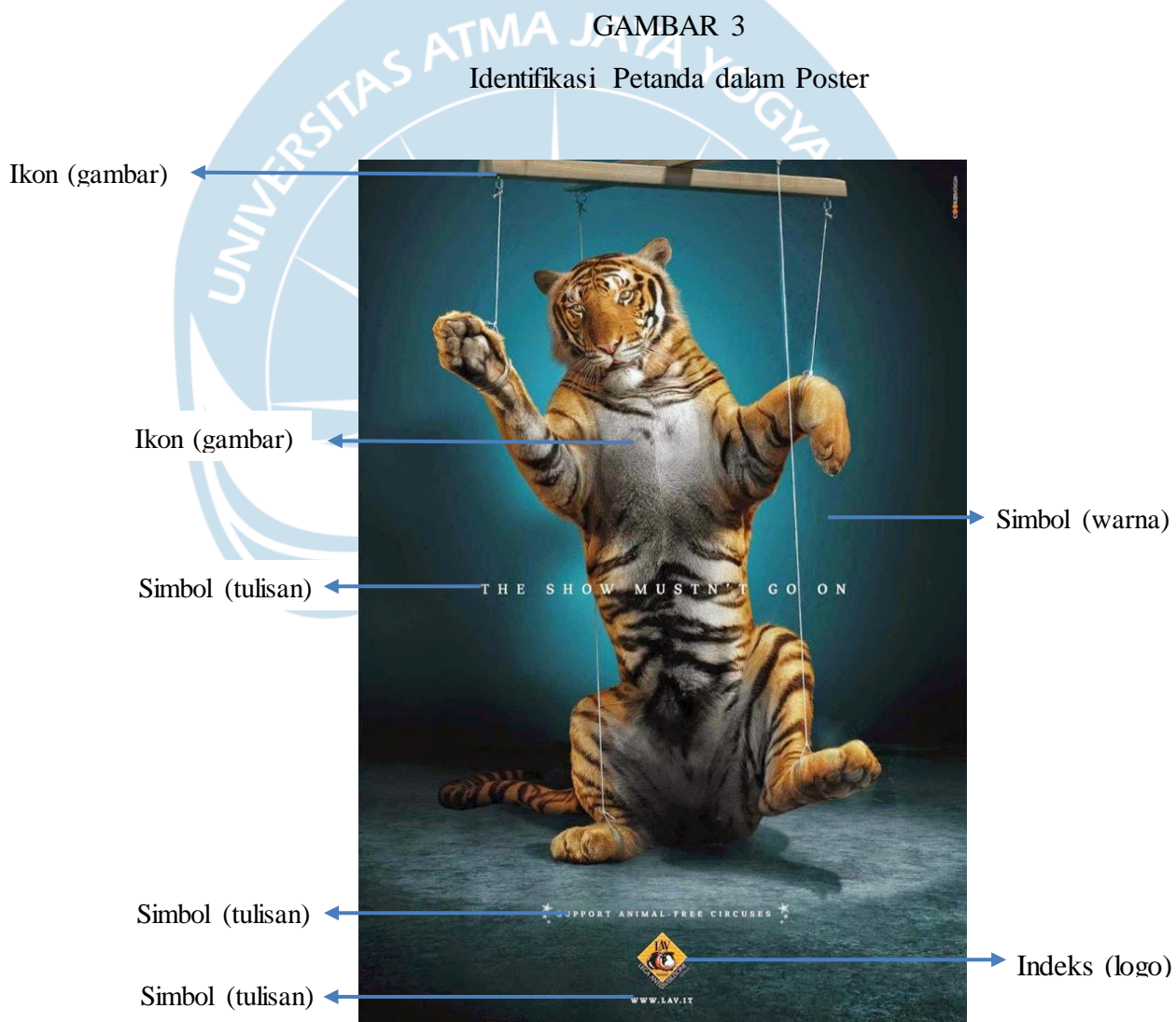
1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan fokus pada analisis semiotika pada poster kampanye anti-sirkus “The Show Musn’t Go On”. Menurut Cresswell dalam Somantri (2005, h. 58), penelitian kualitatif pada umumnya digunakan untuk mengkonstruksi realitas serta makna kultural dari pihak yang terlibat dalam suatu fenomena. Penelitian kualitatif selalu berusaha untuk mengkonstruksi realitas dan memahami makna yang ada, sehingga penelitian ini memperhatikan proses, kejadian atau peristiwa serta otentisitas.

Analisis semiotika oleh Charles Sanders Peirce yang digunakan dalam penelitian ini, dengan objek penelitian poster kampanye “The Show Musn’t Go On” dengan fokus pada tanda-tanda dalam poster. Penelitian ini dilakukan dengan melihat berbagai elemen teks visual dari beberapa tanda yang ditampilkan pada poster.

2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah poster kampanye “The Show Musn’t Go On” dengan fokus pada petanda-petanda dalam poster yang dijabarkan menggunakan semiotika Charles Sanders Peirce. Berikut penjabaran petanda-petanda tersebut:



Sumber: Olahan Peneliti, 2021

TABEL 2
Identifikasi Petanda dalam Poster

No.	Representamen	Jenis Tanda
1	Seekor harimau	Ikon
2	Kayu, tali marionette & lampu sorot	Ikon
3	Warna biru sebagai latar belakang	Simbol
4	Tulisan “The Show Mustn’t Go On”	Simbol
5	Tulisan “support animal free circuses”	Simbol
6	Tulisan “www.lav.it”	Simbol
7	Logo organisasi Lega Anti Vivisezione	Indeks

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2021.

Tabel di atas berisikan temuan data dari poster “The Show Musn’t Go On”. Masing-masing tanda sudah dikategorikan berdasarkan teori semiotika Charles Sanders Peirce.

3. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data

a. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data utama berupa sebuah poster kampanye dengan mengidentifikasi tanda-tanda visual yang terdapat dalam poster kemudian mengolah data yang ditemukan, menganalisa setiap tanda yang ada menggunakan segitiga triadik milik Charles Sanders Peirce. Pengumpulan data dibagi menjadi dua kategori, yaitu dengan mengumpulkan data primer berupa poster “The Show Musn’t Go On” yang menjadi objek utama penelitian ini. Kemudian data

sekunder berupa referensi dari sumber-sumber lain seperti buku, jurnal, artikel dan lainnya.

Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara melihat poster, memperhatikan tanda-tanda yang ada, mencatat tanda satu persatu kemudian mengidentifikasi serta menjabarkan tanda ke dalam 3 kategori tanda: ikon, indeks dan simbol. Data yang dikumpulkan berupa tanda visual. Sedangkan untuk pengumpulan data sekunder dilakukan dengan berselancar di internet, membaca buku, jurnal serta artikel yang berhubungan dengan topik penelitian.

b. Analisis Data

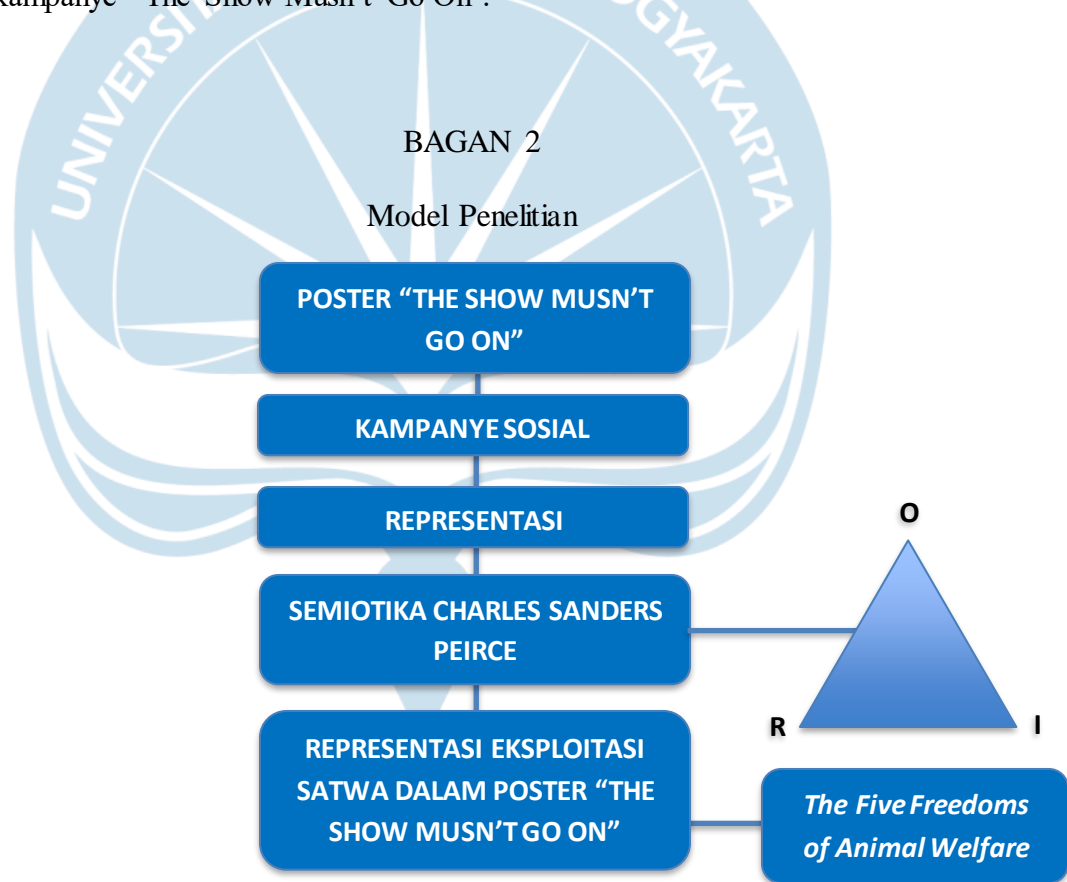
Penelitian ini menggunakan semiotika Charles Sanders Peirce melalui pendekatan kualitatif sebagai metodenya dengan menggunakan model segitiga triadik milik Peirce sebagai alat bantu untuk menganalisis tanda-tanda dari poster. Peneliti menemukan 7 tanda yang terdiri dari 2 ikon, 4 simbol, dan 1 indeks.

Aplikasi model triadik Peirce dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat tanda yang ada pada poster. Kemudian analisis dilakukan dengan mengolah data berupa tanda visual agar dapat memperoleh makna. Proses interpretasi dilakukan dengan menggunakan triadik semiotika dengan pertamata mengidentifikasi tanda berdasarkan jenis tandanya sebagai ikon, indeks atau simbol.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model semiotika Charles Sanders Peirce untuk melihat representasi eksploitasi satwa dalam poster bukan melihat bagian linguistiknya saja seperti semiotika milik Ferdinand de Saussure yang memiliki akar sastra. Peneliti membutuhkan kerangka berpikir semiotika

yang mampu menganalisis bagian visual maupun linguistik. Begitu juga peneliti tidak menggunakan kerangka *post-strukturalisme* sehingga tidak menggunakan semiotika milik Roland Barthes. Maka dari itu, semiotika milik Charles Sanders Peirce adalah model yang tepat untuk digunakan dalam penelitian ini.

Penelitian ini juga menggunakan teori kesejahteraan satwa atau *animal welfare* dengan menggunakan konsep “*The Five Freedoms*” untuk menjelaskan dan menjabarkan bentuk eksploitasi satwa yang direpresentasikan dalam poster kampanye “The Show Musn’t Go On”.



Sumber: Olahan Peneliti, 2021